

Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Melalui SIMDA-NG FMIS Pada Inspektorat Daerah Kota Tegal

Siti Fatimah¹, Vina Nur Azizah², Ahmad Dhia Iqbal³, Gunawan Aji⁴
¹⁻⁴UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: sitifatimah20093@mhs.uingusdur.ac.id¹, vinanurazizah@mhs.uingusdur.ac.id²,
ahmaddhiaiqbal@mhs.uingusdur.ac.id³, gunawanaji@uingusdur.ac.id⁴

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 4 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Abstract. *The aim of this research is to analyze how the use of the SIMDA FMIS application in the Regional Inspectorate of Tegal City can improve the quality of financial reports. Descriptive qualitative research is a type. Primary and secondary data are the types of data used. Interviews, documentation and observations were used to collect data. The research results show that the Regional Inspectorate of Tegal City has used SIMDA FMIS well, according to four indicators: communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. Communication indicators show that communication has gone well, there is no conflict between policy implementers and policy makers and no information distortion, according to communication indicators. Resource indicators are well implemented, there are three factors that ensure the successful use of SIMDA-NG FMIS: resources have adequate expertise and skills; employees are involved in training and education; and facilities and infrastructure that support the use of SIMDA-NG FMIS. Disposition indicators (attitudes), implementers have a positive attitude towards the policy of using the SIMDA-NG FMIS application because it allows employees to prepare financial reports and provide supporting evidence that is more comprehensive, effective and in accordance with the needs for monitoring financial position and performance achievements. Indicators of the bureaucratic structure, especially the level of supervision, have worked well as shown by the smooth submission of financial reports which have never been hampered by SIMDA-NG FMIS.*

Keywords: *Quality, Financial Reports, Use, Policies, SIMDA FMIS*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penggunaan aplikasi SIMDA-NG FMIS di Inspektorat Daerah Kota Tegal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenisnya. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tegal telah menggunakan SIMDA FMIS dengan baik, menurut empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, tidak ada konflik antara pelaksana kebijakan dan perintah dari pembuat kebijakan dan tidak ada distorsi informasi. Indikator sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat tiga faktor yang memastikan keberhasilan penggunaan SIMDA-NG FMIS: sumber daya memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai; pegawai terlibat dalam pelatihan dan diklat; dan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan SIMDA-NG FMIS. Indikator disposisi (sikap), para implementor memiliki sikap positif terhadap kebijakan penggunaan aplikasi SIMDA-NG FMIS karena memungkinkan pegawai menyusun laporan keuangan dan memberikan bukti pendukung yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memonitor posisi keuangan dan pencapaian kinerja. Indikator struktur birokrasi, khususnya tingkat pengawasan telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh kelancaran penyampaian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA-NG FMIS.

Kata Kunci: kualitas, laporan keuangan, penggunaan, kebijakan, SIMDA FMIS

PENDAHULUAN

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta. Laporan keuangan yang baik sangat penting untuk membantu manajemen suatu organisasi membuat keputusan

yang tepat. Metode yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah yang dianggap kurang transparan dan tidak akuntabel sering terjadi dikarenakan laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami serta dapat dibandingkan merupakan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas menurut SAP (Azzindani & M. Irwan, 2020). Teknologi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas laporan keuangan. Sangat penting untuk terus mengikuti kemajuan teknologi dan memasukkannya ke dalam strategi keuangan organisasi.

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, "Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi canggih untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah dan mengeluarkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang kemudian aplikasi ini dinamakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)."

Pengembangan SIMDA merupakan salah satu tahap implementasi akuntansi berbasis akrual (Hardjanto, 2019). Pelopor pengembangan aplikasi SIMDA yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Manfaat SIMDA keuangan berbasis akrual adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan merupakan bagian dari sistem keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi ini. Pengelolaan data dan informasi menggunakan aplikasi SIMDA diharapkan dapat memperbaiki kualitas efisiensi perencanaan dan penganggaran kegiatan pemerintahan (Hardjanto, 2019).

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah *Financial Management information system* (SIMDA FMIS) adalah langkah berikutnya dalam pengembangan SIMDA. Penerapan SIMDA FMIS berlandaskan pada peraturan Kementerian dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan implementasi SIMDA FMIS yaitu guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu serta dapat diandalkan sesuai dengan peraturan (Rahmayanti & Kurniati, 2023).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan atau yang biasa dikenal *good government governance* merupakan harapan bagi masyarakat luas. Tata pemerintahan yang baik merupakan tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa, yang sikap dan pola perilaku para pelakunya didasarkan pada asas dan ciri tertentu. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan

yang baik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan suasana keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas negara dan masyarakat. Tata kelola yang baik dipraktikkan di sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar (Azzindani & M. Irwan, 2020). *Good government governance* dapat terlaksana jika struktur birokrasi yang tersusun memiliki kompetensi dan dapat diandalkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menjelaskan demi terwujudnya pemerintahan yang baik perlu dilaksanakannya manajemen keuangan dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel (Azzindani & M. Irwan, 2020). Jika aparat pemerintah berkinerja baik, pemerintah dapat membangun pemerintahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak manapun, dikarenakan aplikasi SIMDA-NG FMIS baru berlaku pada tahun 2022 sehingga belum banyak penelitian yang membahas terkait topik tersebut, terkhusus pada Inspektorat Daerah Kota Tegal.

KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya, untuk mencapai tujuannya, sebuah kebijakan harus diterapkan. Sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan menerapkan kebijakan itu sendiri. Pengimplementasian kebijakan publik dapat dilakukan dalam dua cara yaitu secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kedudukan implementasi kebijakan adalah sangat penting dalam proses kebijakan sebagaimana pandangan Chief D.O.Udoji dalam (Purwanto & Sulis, 2012) Implementasi kebijakan sama pentingnya dengan pembuatan kebijakan, bahkan mungkin lebih penting. Kebijakan akan tetap menjadi angan-angan kecuali mereka diterapkan.

Implementasi kebijakan banyak memerlukan tenaga kerja, dana, dan kemampuan organisasi yang lebih baik daripada yang ada. George Edward III dalam (Purwanto & Sulis, 2012) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi serta komunikasi dapat memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem yang mengelola semua data atau informasi perusahaan disebut sistem informasi manajemen (Mohamad Ridwan, 2021). Sistem sangat penting untuk pergerakan dalam segala

kegiatan. Tanpa konsep sistem, kegiatan atau pekerjaan akan berjalan tanpa kendali. Sebuah sistem terdiri dari tiga jenis elemen yang saling berhubungan dan berdampak pada satu sama lain. Diantara elemennya yaitu masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*). Sistem akan berfungsi dengan baik jika semua fiturnya bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Jika dibangun dari informasi yang tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi, informasi dapat meningkatkan pengetahuan penerima. Saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan informasi terus meningkat. Bukan banyaknya informasi yang dihasilkan akan tetapi kualitas informasilah yang dibutuhkan. kelengkapan (*completeness*), kesesuaian (*relevancy*), ketelitian (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*) dan ringkas (*conciseness*) adalah lima standar yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas informasi.

Kualitas Laporan keuangan

Defenisi kualitas menurut Eliana dalam (Kasram, 2021) didefinisikan sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur melalui tingkat ketidaksesuaian dan dihasilkan melalui pemeriksaan. Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 yaitu sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas juga menunjukkan bahwa informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022). Laporan keuangan akan memiliki kualitas yang baik jika informasinya bebas dari kekeliruan dan kesalahan material.

SIMDA FMIS (*Financial Management Information System*)

Pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghasilkan SIMDA FMIS atau SIMDA Next-G berbasis web. Keunggulan Simda FMIS berbasis web sendiri dapat dioperasikan oleh penanggungjawab pengelola keuangan, para bendaharawan nantinya dapat melakukan akses data dari mana pun. Hal ini tidak lagi mengharuskan adanya instalasi aplikasi Simda pada perangkat laptop.

Dalam mengembangkan aplikasi SIMDA didasari dengan hukum sebagai berikut:

- a. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam perjalanan evolusi aplikasi SIMDA sejak tahun 2005 telah berbasis kas menuju akrual sesuai dengan standar SAP, di tahun 2007 sub sistem SIMDA terus dikembangkan dengan mempertimbangkan peraturan dan kebutuhan pemda, dimulai sejak tahun 2015 dengan pengembangan SIMDA keuangan telah berbasis akrual sesuai SAP. Kemudian pada tahun 2017, SIMDA melangkah lebih jauh dengan mengembangkan Aplikasi Perencanaan berbasis Web, pada tahun 2019 SIMDA telah mengintegrasikan dirinya dengan semua sub sistem dan aplikasi eksternal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Alur dari aplikasi SIMDA-NG/FMIS sendiri merupakan merupakan satu alur yang utuh sejak perencanaan jangka menengah (5 tahunan), perencanaan tahunan, penganggaran, penatausahaan yang meliputi belanja, pendapatan serta BMD, akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja yang berbasis web dengan aplikasi dan database terpusat di server.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelediki kondisi objek secara alami (Prof.Dr.Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Kota Tegal. Pilihan tempat ini berdasarkan fakta bahwa entitas tersebut menggunakan SIMDA FMIS dalam melaporakan laporan keuangan dan akan memberikan kejelasan menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti, termasuk data dan keterangan.

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan 2 sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil wawancara dengan Bendahara sebagai implementor dan Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan diperoleh secara langsung tanpa perantara. Namun, karena kesibukan bendahara, wawancara lisan digantikan dengan wawancara tertulis dengan daftar pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Kasubag umum, kepegawaian, dan keuangan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yang memiliki daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Sedangkan sumber data sekunder berupa data yang ada dilaporan dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIMDA FMIS dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal.

Teknis pengumpulan data ini yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Wawancara digunakan dengan maksud dapat memperoleh informasi terkait subjek penelitian dari narasumber (*key informan*) (Giawa, 2021). Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan gejala yang terlihat pada objek penelitian secara langsung dalam pelaporan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal (Rahmayanti et al., 2023). Dokumen adalah pengumpulan data yang berasal dari laporan yang tersedia, biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya tulis. Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode pengamatan dan wawancara karena membuat hasil penelitian yang dihasilkan dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan dukungan data yang diperoleh dari dokumen yang menjadi sumber data penelitian (Giawa, 2021). Data yang ditranskripkan berasal dari wawancara dengan Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, serta data dari Bendahara, yang diperoleh dari pengisian pertanyaan teks wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan aplikasi SIMDA sejak tahun 2005, awalnya berbasis kas dan kemudian berkembang menuju akrual sesuai standar SAP. Pada tahun 2007, sub sistem SIMDA terus dikembangkan dengan mempertimbangkan peraturan dan kebutuhan pemda. Pada tahun 2015, SIMDA Keuangan mengalami pengembangan lebih lanjut menjadi berbasis akrual sesuai SAP. Pada tahun 2017, SIMDA mulai mengembangkan Aplikasi Perencanaan berbasis Web. Pada tahun 2019, SIMDA mengintegrasikan dirinya dengan semua sub sistem dan aplikasi eksternal, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, di tahun 2020 dan seterusnya, SIMDA akan memusatkan perhatian pada pembuatan Data Warehouse CACM dan Siswakeubangda sebagai langkah strategis dalam menyajikan sistem yang kuat dan terintegrasi untuk mendukung berbagai kebutuhan Pemda. Pada tahun 2022, terjadi pembaruan pada SIMDA menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation (SIMDA-NG) atau dikenal juga sebagai SIMDA-NG FMIS. SIMDA-NG menggunakan platform web dan melakukan integrasi dengan sistem SIMDA sebelumnya.

SIMDA FMIS adalah sebuah aplikasi keuangan daerah yang telah menggabungkan keempat tahap dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi SIMDA FMIS juga mengintegrasikan proses transaksi keuangan secara otomatis dengan proses penjurnalan, sehingga setiap transaksi keuangan dapat segera dilihat pada jurnal atau transaksi tersebut, dan pelaporannya dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk melakukan analisis implementasi aplikasi SIMDA FMIS dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Inspektorat

Daerah Kota Tegal, digunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri dari empat aspek atau dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Implementasi akan menjadi efektif jika individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan memahami dengan baik ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut (Rahmayanti et al., 2023). Pentingnya penerimaan kebijakan oleh semua personil juga terlihat dari pemahaman yang jelas dan akurat mengenai maksud serta tujuan dari kebijakan tersebut.

Pandangan terhadap pentingnya pemahaman individu terhadap ukuran dan tujuan kebijakan di Inspektorat Daerah Kota Tegal sejalan dengan teori bahwa implementasi kebijakan akan efektif jika individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan memahami dengan baik ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Keterlibatan pegawai Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA-NG FMIS menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap makna dan tujuan dari penerapan aplikasi ini. Faktanya, SIMDA-NG FMIS sebagai satu-satunya aplikasi untuk penatausahaan keuangan di Kota Tegal memperlihatkan penerimaan yang baik dari semua personil, karena setiap individu terlibat dalam proses pengoperasian mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS sangat berkontribusi pada proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal, yang selaras dengan pemahaman yang baik terhadap maksud dan tujuan penerapan kebijakan. SIMDA FMIS juga mendukung proses pelaporan keuangan dengan menyediakan menu untuk printout laporan keuangan dan transaksi, serta otomatisasi pencatatan pada masing-masing pos laporan.

Pada bagian keuangan, pengelolaan keuangan dengan aplikasi ini melibatkan persiapan dokumen keuangan seperti SPJ atau transaksi keuangan yang akan diuangkan. Setelah itu, dokumen tersebut diinput ke dalam aplikasi untuk menghasilkan *output* berupa SPP-SPM. Dalam konteks pelaporan, semua transaksi keuangan yang telah diinput ke dalam aplikasi diproses secara otomatis, menghasilkan *output* berupa laporan yang diperlukan seperti Buku Kas Umum (BKU), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Buku Pajak, dan berbagai laporan keuangan lainnya.

Proses penyaluran komunikasi implementasi kebijakan aplikasi SIMDA-NG FMIS di Inspektorat Kota Tegal berjalan lancar, terindikasi dari ketiadaan konflik antara pelaksana kebijakan dan instruksi yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Rantai informasi yang relatif singkat juga memastikan bahwa tidak ada distorsi informasi yang terjadi. Meskipun proses

transmisi komunikasi implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS menghadapi tantangan seperti *server down* dan kendala jaringan, pelaksanaan tetap berlangsung dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan yang efektif (Rahmayanti et al., 2023). Kualitas sumber daya manusia, terutama keahlian dan keterampilan, dianggap sangat penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan penggunaan Aplikasi SIMDA-NG FMIS di Inspektorat Daerah Kota Tegal. Untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, Inspektorat Daerah Kota Tegal memperhatikan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian dalam proses rekrutmen. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan melibatkan mereka dalam diklat dan pelatihan, yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal sebagai OPD pengampu. Selain itu, Inspektorat Daerah Kota Tegal juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS melalui pengadaan belanja modal sarana prasarana, memenuhi kebutuhan seperti perangkat komputer, jaringan internet stabil dan faktor lainnya.

Disposisi (Sikap)

Sikap implementor memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan. Apabila implementor menyetujui isi kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan antusias (Rahmayanti et al., 2023). Namun, jika pandangan implementor tidak sejalan dengan pembuat kebijakan, proses penerapan dapat menghadapi berbagai kendala. Implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS di Inspektorat Daerah Kota Tegal terbukti berhasil meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas penatausahaan keuangan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh sikap positif para implementor serta upaya peningkatan pemahaman dan integritas dalam penerapan kebijakan. Sikap positif para implementor dianggap krusial dalam menjamin kelancaran penatausahaan melalui Aplikasi SIMDA-NG FMIS, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Aplikasi SIMDA FMIS memberikan kemudahan bagi pegawai dalam menyusun laporan keuangan dan menyediakan bukti pendukung yang lebih komprehensif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memonitor posisi keuangan dan pencapaian kinerja. Pegawai yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan hanya perlu memasukkan data transaksi ke dalam menu-menu aplikasi yang telah terintegrasi, sehingga proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih efisien. Aplikasi ini mencakup seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga pengolahan otomatis oleh sistem aplikasi, menghasilkan output berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Inspektorat Daerah Kota Tegal menjalankan strategi untuk memastikan sikap positif para implementor terhadap Aplikasi SIMDA-NG FMIS, khususnya melalui pelaporan penatausahaan yang tepat waktu. Pelaksanaan aplikasi ini dinilai lebih akuntabel dan mempermudah deteksi kesalahan, sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam hal insentif, pengelolaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Kota Tegal tidak dilakukan oleh setiap instansi atau OPD, karena besaran TPP sudah diatur dalam peraturan walikota. Terkait implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS, disarankan agar FMIS dapat terintegrasi dengan aplikasi lain seperti DJP, E-SPTPD, pajak daerah, dan TKDN, sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem dalam mendukung berbagai kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Tegal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup sifat, norma-norma, dan pola hubungan yang secara berulang terjadi dalam lembaga eksekutif, yang dapat memiliki hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka kelola dalam pelaksanaan kebijakan. Kerjasama banyak individu diperlukan dalam menghadapi kebijakan yang kompleks. Faktor-faktor seperti tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses organisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi, yang mencakup sifat, norma-norma, dan pola hubungan di dalam lembaga eksekutif, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di Inspektorat Daerah Kota Tegal. Sejauh ini, struktur birokrasi di Inspektorat Daerah Kota Tegal bekerja sesuai dengan peraturan, dengan Inspektur sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab, dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang dijabat oleh sekretaris, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang dijabat oleh Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, dan SA (Staf Administrasi) yang memiliki pengaruh positif dan mendukung kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dianggap mendukung implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal telah berjalan dengan efektif. Pengaruh struktur birokrasi, terutama dalam konteks pengawasan terhadap implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS, tercermin dari kelancaran penyajian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA-NG FMIS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penggunaan aplikasi SIMDA FMIS pada Inspektorat Daerah Kota Tegal telah menggunakan SIMDA FMIS dengan baik, menurut empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, tidak ada konflik antara pelaksana kebijakan dan perintah dari pembuat kebijakan dan rantai informasi yang singkat memastikan bahwa tidak ada distorsi informasi, menurut indikator komunikasi. Indikator sumber daya diimplementasikan dengan baik, terdapat tiga faktor yang memastikan keberhasilan penggunaan SIMDA-NG FMIS: sumber daya memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai dilihat dari latar belakang pendidikan; pegawai terlibat dalam pelatihan dan diklat untuk meningkatkan kualitas sumber daya; dan sarana dan prasarana melalui belanja modal yang mendukung penggunaan SIMDA-NG FMIS. Indikator disposisi (sikap), para implementor memiliki sikap positif terhadap kebijakan penggunaan aplikasi SIMDA-NG FMIS karena memungkinkan pegawai menyusun laporan keuangan dan memberikan bukti pendukung yang lebih komprehensif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan untuk memonitor posisi keuangan dan pencapaian kinerja.

Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan sub unit dan proses implementasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Inspektorat Daerah Kota Tegal telah berjalan dengan efektif, sehingga indikator struktur birokrasi khususnya tingkat pengawasan telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh kelancaran penyampaian laporan keuangan yang tidak pernah terhambat oleh SIMDA-NG FMIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzindani, R., & M. Irwan. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Giawa, G. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Neraca Agung*, 3(1), 101-109.

- Hardjanto, K. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Berbasis AkruaI Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 11–20. <https://doi.org/10.15408/jti.v12i1.6263>
- Kasram, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. *Universitas Muhammadiyah Palopo*, July, 1–23.
- Mohamad Ridwan, Y. W. (2021). *Sistem Informasi Manajemen*. In Widina Bhakti Persada Bandung.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulis, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. September, 20.
- Rahmayanti, S., Syaumudinsyah, Kurniati, N., & Nurwahidah. (2023). Implementasi Aplikasi SIMDA FMIS (Financial Management Information System) Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(2), 469–482.